

2021



LAPORAN TAHUNAN

MAHKAMAH SYAR'IAH SINABANG



**MENUJU MAHKAMAH SYAR'IAH
YANG AGUNG**



Bismillahirrahman nirrahim

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas taufiq dan inayah-Nya Laporan Tahunan Pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Sinabang ini dapat diselesaikan yang merupakan pencerminan kegiatan selama satu tahun sebagai realisasi program kerja tahun 2021 .

Laporan Tahunan ini disusun sebagai deskripsi sekaligus sebagai bahan evaluasi dari hasil-hasil kerja yang dilaksanakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang selama satu tahun, baik berkaitan dengan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai maupun kendala-kendala yang dihadapi serta pemecahannya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini dibuat pula sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional baik tugas yang menyangkut teknis yustisial maupun administrasi serta tugas-tugas lain yang dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Penyusunan Laporan Tahunan ini telah kami upayakan dengan optimal, namun demikian kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan yang menyertainya, oleh karena itu kritik konstruktif sangat kami harapkan, demi perbaikan penyusunan Laporan Tahunan berikutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT pemilik kesempurnaan, kekuatan dan petunjuk, kami mohon petunjuk dan kekuatan dan semoga Laporan ini bermanfaat. Alhamdulillah.

Sinabang, Januari 2022
Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang,

Muzakir, S.HI, M.H
NIP. 19830217 200704 1 001.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. PENDAHULUAN.....	1
1. Visi Mahkamah Syar'iyah Sinabang	3
2. Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang	4
BAB II KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH SYAR'YAH SINABANG.....	6
A. Keadaan Perkara	6
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	6
B. Penyelesaian Perkara	7
1. Jumlah Perkara yang Diputus	7
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	8
3. Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi & PK	8
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi.....	9
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi.....	9
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan).....	9
1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM)	9
2. Pelaksanaan Sidang Kelililng/Sidang Terpadu.....	10
3. Penyelesaian Perkara Prodeo.....	10
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	11
A. Sumber daya Manusia	11
a. Mutasi	15
1. Mutasi Kenaikan Pangkat.....	15
2. Mutasi Masuk	16
3. Mutasi Keluar	17
4. Promosi /Pengangkatan dalam Jabatan.....	17
b. Pensiun	18
c. Diklat	18
1. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang Telah Mengikuti Diklat.....	18
2. Regulasi Tahun 2021	20

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARPRAS DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26
A. Pengelolaan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Sinabang	26
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	29
1. Gedung Kantor.....	29
2. Sarana Transportasi/Kendaraan Dinas	31
3. Rumah Dinas	32
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	32
1. Implementasi e-court	32
2. Implementasi SIPP	33
3. Perangkat Keras (Hardware).....	34
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK.....	35
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	35
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	35
C. Inovasi Pelayanan Publik	36
BAB VI PENGAWASAN	37
A. Pengawasan Internal	37
B. Evaluasi	40
1. Administrasi Perkara.....	40
2. Adminstrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	40
3. Adminstrasi Umum.....	40
4. Kinerja Pelayanan Publik.....	40
5. Manajemen Peradilan.....	40
BAB VI PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran dan Rekomendasi	42

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang merupakan suatu lembaga *public service* dalam suatu penegakan hukum dan keadilan yang bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan Kehakiman di Indonesia bersama-sama dengan peradilan yang lain, senantiasa bertekad untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern dalam rangka mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan tentram, dan siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 menitikberatkan pembenahan kinerja di bidang administrasi, manajemen peradilan, dan teknologi informasi guna menunjang terlaksananya tugas pokok dan fungsi peradilan agama dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya, sehingga diharapkan akan tercipta kualitas output internal peradilan sesuai dengan rasa kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuhkan suburkan rasa kekeluargaan dan tanggungjawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi, manajerial, dan teknologi informasi sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI pada tahun 2021, yakni peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan peradilan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memberikan penekanan khusus melalui peningkatan kualitas pengawasan internal, terutama pengawasan melekat secara hirarkis oleh atasan langsung dan efektifitas hakim pengawas bidang, serta secara konsisten dan konsekuen melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. Disamping itu, membuka diri terhadap pengawasan eksternal sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan, pada tahun 2021 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, baik fisik maupun mental, agar terwujud aparatur peradilan yang tangguh, profesional dan berwibawa, serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai peradilan tingkat pertama yang beralamat di Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya diantara orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah. Selain itu Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang : Ahwal Al-Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang berusaha melakukan pelayanan secara prima, dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi, untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Penerapan program Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam pelayanan, penanganan dan penyelesaian perkara, dari proses pendaftaran

sampai putus dengan sistem pengolahan data dengan komputerisasi oleh program SIPP.

2. Pelaksanaan transparansi peradilan sebagaimana dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki Website dengan situs : <http://ms-sinabang.net> dan E-mail Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan alamat : ms.sinabang@gmail.com. dengan harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Mahkamah Syar'iyah Sinabang oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan serta mempermudah komunikasi baik informasi maupun data yang dibutuhkan. Di samping itu Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara aktif mengikuti perkembangan dunia peradilan pada Website Mahkamah Agung RI dengan situs www.mahkamahagung.go.id, Website Ditjen Badilag (<http://badilag.net>), dan Website Mahkamah Syar'iyah Aceh (<http://ms-aceh.go.id>).
3. Penerapan program Aplikasi Pelayanan Masyarakat (ALAM) dalam pelayanan, proses pendaftaran dan informasi Sidang dengan sistem pengolahan data dengan Sistem aplikasi berbasis Android yang dapat Didownload dan diakses melalui HP Smartphone Android.
4. Melakukan pembinaan kepada seluruh pegawai dan PPNPN secara berkala dan terus menerus.

Untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern, serta siap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, serta diridhai Allah SWT, maka dirumuskan Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang, yakni :

VISI MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG

**TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'IYAH SINABANG
YANG AGUNG**

MISI MAHKAMAH SYAR'ITYAH SINABANG

1. Menciptakan kinerja aparat peradilan yang berdedikasi, berintegritas tinggi dan profesional, sehingga mampu menjadikan Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai badan peradilan yang mendapatkan kepercayaan publik.
2. Meningkatkan akses pelayanan publik dengan membangun sistem manajemen pelayanan prima melalui manajemen penanganan perkara maupun administrasi.
3. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang berwibawa, bermartabat, dan independen sesuai kompetensi Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menetapkan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan yang ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan perjanjian kinerja tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- d. Menetapkan matrik rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA) Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah :

- a. Terlaksananya penyelesaian perkara pada tingkat pertama yang diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara cepat dan biaya ringan;
- b. Terselenggaranya tertib administrasi perkara secara baik pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- c. Terlaksananya pelayanan Mahkamah Syar'iyah Sinabang kepada masyarakat pencari keadilan secara baik;
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang teknis yudisial pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan administrasi umum, anggaran, sarana dan prasarana pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

BAB II

KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH SYAR'ITYAH SINABANG

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai susunan Struktur Organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Panitera Mudah Jinayat, Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta staf administrasi umum yang membantu kelancaran tugas masing-masing bagian.

Adapun tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah dan ekonomi syariah. Di samping itu, berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga mempunyai tugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Ahwal Al-Syakhsiyah, Muamalah dan Jinayah.

A. KEADAAN PERKARA

❖ Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang tahun 2021 tidak ada perkara yang tersisa adapun perkara yang selesai tersebut terdiri sebanyak 183 yaitu 72 perkara gugatan, 97 perkara permohonan dan 14 perkara Jinayat.

B. PENYELESAIAN PERKARA

❖ Jumlah Perkara yang diputus

penyelesaian perkara perdata yang masuk pada tahun 2021 sebanyak 183 perkara yang terdiri dari 72 perkara Gugatan, 97 perkara permohonan dan 14 perkara Jinayat pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak memiliki perkara yang tersisa.

Adapun penyelesaian perkara Jinayat yang terselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 14 (empat belas) perkara yaitu 10 (sepuluh) maisir atau perjudian, 3 (tiga) Iktilath dan 1 (satu) perkara pemerkosaan sedangkan perkara Khamar dan Khalwat nihil, semua perkara jinayat yang masuk pada tahun 2021 telah diputus tepat waktu dan telah dieksekusi.

Secara keseluruhan perkara yang diterima dan diputus Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik berikut ini :

No	Nama Satker	Perkara Masuk	Perkara Yang Putus	Sisa Perkara	*Keterangan
I	Mahkamah Syar'iyah Sinabang				
1.	Perdata	169	169	0	0 perkara sisa 2020
2.	Jinayah	14	14	0	

**Tabel Rincian Perkara Perdata yang diterima dan diputus pada
Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021**

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Cerai Talak	13	0 cabut
2.	Cerai Gugat	58	0 cabut
3.	Kewarisan	0	0 cabut /tolak
4.	Penguasaan Anak	0	Putus
5.	Itsbat Nikah	48	1 cabut
6.	Penetapan ahli waris	21	3 Cabut
7.	Wali Adhal	0	0
8.	Perwalian	2	Putus
9.	Pencegahan Kawin	0	0

10	Dispensasi Kawin	26	3 Cabut
11	Lain-lain/Izin Poligami	1	Tolak
	Jumlah	169	Cabut 7

**Tabel Rincian Perkara Jinayah yang diterima dan diputus pada
Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2021**

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Khamar	0	Telah Dieksekusi
2.	Maisir	10	Telah Dieksekusi
3.	Iktilath	3	Telah Dieksekusi
4.	Khalwat	0	-
	Pemeriksaan	1	
	Jumlah	14	

❖ **Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu**

Dalam tahun 2021 pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah telah menyelesaikan perkara sesuai ketentuan waktu yang ditentukan sebagai mana table berikut:

No	Nama Satker	Perkara diterima	Perkara yang diputus	Waktu Penyelesaian Perkara		
				1 s.d 90 hari (perkara)	91 s.d 180 hari (perkara)	Diatas 180 hari (perkara)
1	MS Sinabang	183	183	64	52	67

❖ **Jumlah Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK**

Tahun 2021 perkara tidak ada Perkara Perdata pada wilayah hukum pengadilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Sinabang atau (NIHIL) perkara yang melakukan upaya hukum banding dan atau upaya Peninjauan Kembali (PK).

Secara kuantitas perbandingan perkara pada tahun 2021 jumlah perkara yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya yaitu 2020 yang berjumlah 178 perkara sedangkan tahun 2021 sebanyak 183 perkara, jadi persentase kenaikan jumlah perkara masuk dan ditangani oleh

Mahkamah Syar'iyah Sinabang berjumlah sekitar 0,5% (Nol Koma lima persen) atau 5 perkara termasuk perkara Jinayah yang masuk dan dieksekusi.

❖ **Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi.**

Dalam tahun 2021 ada 2 (Dua) perkara perdata yang berhasil Dimediasi oleh Hakim mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

❖ **Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi.**

Dalam tahun 2021 yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak ada (NIHIL) perkara pada anak.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Adapun untuk tahun 2019 dan tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara khusus telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut dan pada tahun 2021 sesuai surat Ketua Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 3955/DJA.3/HM.00/11/2021 Tanggal 30 November 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah semaksimal mungkin berusaha mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Akreditasi tersebut pada pelaksanaan tugas terutama dalam melayani masyarakat pencari keadilan sehingga mendapatkan penetapan hasil surveillance dengan nilai A (Excellent).

❖ **Pelaksanaan POSBAKUM**

Untuk tahun anggaran 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang mendapatkan Alokasikan pagu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Nomor SP-DIPA-005-04.2.401731/2021 untuk kegiatan Pos Bantuan Hukum atau POSBAKUM.

❖ **Pelaksanaan Sidang Keliling / Sidang Terpadu**

Dalam tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melaksanakan persidangan di Luar gedung pengadilan / Sidang keliling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan jumlah perkara 55 (lima puluh lima) perkara.

No	Nama Satker	Pagu DIPA	Penyerapan	Volume Sidang Keliling	Perkaraputus	Lokasi Sidang Keliling
1	MS Sinabang	25.500.000,-	25.000.000,-	27	55	- Kantor KUA - Kantor Camat - Kantor Desa

❖ Sidang Terpadu

No	Nama Satker	Pagu Rp	DIPA	Penyerapan Rp	Volume Sidang	Perkaraputus	Lokasi Sidang Keliling
1	MS Sinabang	-	-	-	-	-	

❖ Penyelesaian Perkara Prodeo

Dalam tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menerima dan menyelesaikan perkara prodeo sebanyak 44 (empat puluh empat) perkara dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang terserap yaitu sebesar Rp. 13.160.000,- (tiga belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) atau 99 %.

No	Nama Satker	Pagu DIPA	Penyerapan	Revisi	Sisa	Persentase	Perkara diterima	Perkara diputus	Sisa
1	MS Sinabang	13.300.000,	13.160.000,	-	140.000	99%	46	46	0

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang tersedia saat ini di Mahkamah Syar'iyah Sinabang seluruhnya berjumlah 26 orang, sebagai berikut :

a. Data Pegawai Negeri dan Calon Pegawai Negeri pada Mahkamah syar'iyah sinabang

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	JABATAN			K ET
			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Muzakir, S.H.I. 198302172007041001	Pembina IV/a	Ketua Pengadilan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang	2021-07- 08	127/KMA/SK/ VI/2021	
2	Iqbal Kadafi, S.H., M.H. 198104202007041001	Penata Tingkat I III/d	Wakil Ketua Pengadilan, Mahkamah Syar'iyah Sinabang	2021-09- 01	154/KMA/SK/ VIII/2021	
3	Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 198608212017121003	Penata Muda III/a	Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang	2020-04- 28	980/DJA/KP.0 4.6/SK/3/2020	
4	Hanif Rabbani. As, S.H. 199508122017121004	Penata Muda III/a	Hakim Tingkat Pertama, Mahkamah Syar'iyah Sinabang	2020-10- 01	2414/DJA/KP. 04.6/SK/09/202 0	
5	Drs. Zul Amin, 196406101992031005	Penata Tingkat I III/d	Panitera Tingkat Pertama, Panitera	2015-12- 29	1345/DJA/KP. 04.6/SK/04/201 6	
6	Maizar, S.H. 197205051994031002	Penata Tingkat I III/d	Sekretaris, Sekretaris	2015-12- 29	38/SEK/Peng. 06.1/12/2015	
7	Arisudin, B.A. 196204161987031004	Penata III/c	Panitera Muda, Panitera Muda Jinayah	2016-01- 08	3970/DJA/KP. 04.6/SK/XII/201 5	
8	Mandarsah, 196502111993021001	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	2015-12- 29	38/SEK/Peng. 06.1/12/2015	
9	Bobo Arsenal, A.Md. 198603292009041003	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan	2021-01- 29	76/SEK/Kp.I/S K/I/2021	
10	Akbar Riansyah, S.E. 198503172015051001	Penata Muda Tingkat I III/b	Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-01- 29	76/SEK/Kp.I/S K/I/2021	
11	Leli Marlina, S.E. 198606142015052001	Penata Muda Tingkat I III/b	Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	2020-08- 19	577/SEK/Kp.I/ SK/VIII/2020	
12	Umi Kalsum, S.H. 198504092019032002	Penata Muda III/a	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan	2020-04- 28	04/SEK/PNS.0 4.1/SK/II/2020	

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	JABATAN			K ET
			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
13	Renaldi Eha, S.T. 199606112020121011	Penata Muda III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris	2020-12- 01	675/SEK/CPNS .04.1/SK/XII/20 20	
14	Zulhayanis Sofyan, A.Md 198705262010032001	Pengatur Tingkat I II/d	Pranata Barang dan Jasa, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-11- 01	1106/SEK/Kp.I /SK/X/2021	
15	Muszar, A.Md 198401142015051001	Pengatur Tingkat I II/d	Pengadministrasi Persuratan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-04- 13	307/SEK/Kp.I/ SK/IV/2021	
16	Tatang Handoko, A.Md 198211202015051001	Pengatur Tingkat I II/d	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-04- 13	307/SEK/Kp.I/ SK/IV/2021	
17	Silviana Dewi Purba, A.Md. 199412222020122009	Pengatur II/c	Arsiparis Pelaksana, Sekretaris	2020-12- 01	676/SEK/CPNS .04.1/SK/XII/20 20	
18	Desri Musdianto, 198512222014081001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Juru Sita, Panitera	2019-01- 18	2305/DJA/KP. 04.6/SK/XI/201 8	

b. Data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang

No.	N a m a	Jabatan	T M T	Pendidikan Terakhir	Ket.
1.	Faisal	Honorar	02-01-2005	S L T A	
2.	Sunarli	Honorar	02-01-2005	S L T A	
3.	Fifi Sarwina	Honorar	02-01-2009	S L T A	
4.	Hardiman	Honorar	02-01-2009	S L T A	
5.	T.Hidayat	Honorar	01-06 -2020	Sarjana	
6.	Yusrawadin	Honorar	02-01-2011	S L T A	
7.	Nurmani	Honorar	01-02-2015	S M P	
8.	Romi Fandaya, A.md., Kom	Honorar	01-02-2018	D-III	

Data Rincian Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang Berdasarkan Jabatan dan Pangkat.

a. Pimpinan

NO	NAMA/ NIP	JABATAN		GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN
		JABATAN	TMT JABATAN	GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	
1	2	4	5	6	7	8
1	Muzakir, S.H.I., MH. 198302172007041001	Ketua Pengadilan	2021-07-08	IV/a	2021-10-01	PASCASARJANA
2	Iqbal Kadafi, S.H., M.H. 198104202007041001	Wakil Ketua Pengadilan	2021-09-01	III/d	2019-04-01	PASCASARJANA

b. Hakim

NO	NAMA/ NIP	JABATAN		GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN
		JABATAN	TMT JABATAN	GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	
1	2	4	5	6	7	8
1	Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 198608212017121003	Hakim Tingkat Pertama	2020-04-28	III/a	2017-12-01	STRATA I
2	Hanif Rabbani. As, S.H. 199508122017121004	Hakim Tingkat Pertama	2020-10-01	III/a	2017-12-01	STRATA I

c. Pejabat Kepaniteraan

NO	NAMA/NIP	JABATAN		GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN
		JABATAN	TMT JABATAN	GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	
1	2	3	4	5	6	7
1	Drs. Zul Amin, 196406101992031005	Panitera Tingkat Pertama	2015-12-29	III/d	2007-10-01	STRATA I
2	Arisudin, B.A. 196204161987031004	Panitera Muda	2016-01-08	III/c	2005-10-01	DIPLOMA III

d. Pejabat Kesekretariatan

NO	NAMA/NIP	JABATAN		GOLONGAN PANGKAT		PENDIDIKAN
		JABATAN	TMT JABATAN	GOLONGAN PANGKAT	TMT GOLONGAN PANGKAT	
1	2	6	7	9	10	
1	Maizar, S.H. 197205051994031002	Sekretaris	2015-12-29	III/d	2020-04-01	STRATA I
2	Mandarsah 196502111993021001	Kepala Sub Bagian	2015-12-29	III/b	2013-04-01	SLTA
3	Akbar Riansyah, S.E. 198503172015051001	Kepala Sub Bagian	2021-01-29	III/b	2019-10-01	STRATA I
4	Bobi Arsenal, A.Md. 198603292009041003	Kepala Sub Bagian	2021-01-29	III/b	2021-04-01	DIPLOMA III

e. Juru Sita

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	JABATAN			KET
			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Desri Musdianto, 198512222014081001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Juru Sita, Panitera	2019-01-18	2305/DJA/KP.0 4.6/SK/XI/2018	

f. Pelaksana

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	JABATAN			KET
			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Leli Marlina, S.E. 198606142015052001	Penata Muda Tingkat I III/b	Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana	2020-08-19	577/SEK/Kp.I/ SK/VIII/2020	
2	Umi Kalsum, S.H. 198504092019032002	Penata Muda III/a	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan	2020-04-28	04/SEK/PNS.0 4.1/SK/II/2020	
3	Renaldi Eha, S.T. 199606112020121011	Penata Muda III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama, Sekretaris	2020-12-01	675/SEK/CPNS .04.1/SK/XII/20 20	
4	Zulhayanis Sofyan, A.Md 198705262010032001	Pengatur Tingkat I II/d	Pranata Barang dan Jasa, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-11-01	1106/SEK/Kp.I /SK/X/2021	
5	Muszar, A.Md	Pengatur	Pengadministrasi	2021-04-13	307/SEK/Kp.I/	

NO	NAMA NIP	GOLONGAN PANGKAT	JABATAN			KET
			Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7
	198401142015051001	Tingkat I II/d	Persuratan, Sub Bagian Umum Dan Keuangan		SK/IV/2021	
6	Tatang Handoko, A.Md 198211202015051001	Pengatur Tingkat I II/d	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum Dan Keuangan	2021-04-13	307/SEK/Kp.I/ SK/IV/2021	
7	Silviana Dewi Purba, A.Md. 199412222020122009	Pengatur II/c	Arsiparis Pelaksana, Sekretaris	2020-12-01	676/SEK/CPNS .04.1/SK/XII/20 20	
8	Desri Musdianto, 198512222014081001	Pengatur Muda Tingkat I II/b	Juru Sita, Panitera	2019-01-18	2305/DJA/KP.0 4.6/SK/XI/2018	

g. Honorer

NO	NAMA	JABATAN	T M T	PENDIDIKAN TERAKHIR	Ket.
1.	Faisal	Staf Keuangan	04-01-2021	S L T A	
2.	Sunarli	Petugas Meja Pendaftaran PTSP	04-01-2021	S L T A	
3.	Fifi Sarwina	Petugas Meja Penyerahan Produk PTSP	04-01-2021	S L T A	
4.	Hardiman	Petugas Keamanan (Satpam)	04-01-2021	S L T A	
5.	T. Hidayat, A. Md., Kom	Supir	04-01-2021	D-III	
6.	Yusrawadin	Petugas Keamanan (Satpam)	04-01-2021	S L T A	
7.	Nurmani	Petugas Kebersihan (Cleaning Service)	04-01-2021	S M P	
8.	Romi Fandaya, A.md., Kom	Petugas Meja Informasi PTSP	04-01-2021	D-III	

❖ **Mutasi**

a. Mutasi Kenaikan Pangkat

Dalam tahun 2021 ada 1 orang Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang Mutasi Kenaikan Pangkat dan 1 orang, yaitu atas nama :

1. Bobi Arsenal, A.Md.

Pada tanggal 01 April 2021, telah naik pangkat dari golongan III/a ke III/b.

b. Mutasi Masuk

Dalam tahun 2021 ada 1 orang Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang Mutasi Masuk 7 orang dan 2 orang di antaranya CPNS, yaitu atas nama:

1. Muzakir, S.H.I., MH.

Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, diangkat dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 08 Juli 2021, yang sebelumnya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Kelas II.

2. Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 154/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021, diangkat dan dilantik oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 01 September 2021, yang sebelumnya sebagai Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kab. Madiun.

3. Tatang Handoko, A. Md.

Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 307/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang sebelumnya sebagai Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

4. Muszar, A. Md.

Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 307/SEK/Kp.I/SK/IV/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang sebelumnya sebagai Staf Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Simeulue.

5. Zulhayanis Sofyan, A.Md.

Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 27 Oktober 2021, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor :

1106/SEK/Kp.I/SK/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021, yang sebelumnya sebagai Staf Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.

6. Renaldi Eha, ST.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 675/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Jabatan sebagai Pranata Komputer dan dilantik oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 04 Januari 2021.

7. Silvia Dewi Purba, A. Md

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 675/SEK/CPNS.04.1/SK/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang ditugaskan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang sebagai IT yang ditunjuk langsung oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 04 Januari 2021.

c. Mutasi Keluar

1. Khairul badri, SH

Hakim Pratama Madya Mahkamah Syar'iyah Sinabang Mutasi ke Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas IB sebagai Hakim Pratama Madya, pada Tanggal 04 Februari 2021.

2. Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sebagai Wakil Ketua, pada tanggal 01 Juli 2021.

3. Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Hakim Pratama Mahkamah Syar'iyah Sinabang Mutasi ke Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan sebagai Hakim Pratama, pada tanggal 31 Agustus 2021.

❖ Promosi/Pengangkatan Dalam Jabatan

Dalam Tahun 2021, ada 2 (dua) orang Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang mendapat promosi/pengangkatan dalam jabatan, yaitu :

1. Akbar Riansyah, SE, sebelumnya sebagai Penyusun Laporan Keuangan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Agung Nomor : 76/SEK/Kp.I/SK/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan dilantik pada tanggal 01 Maret 2021.
2. Bobi Arsenal, A.Md., sebelumnya sebagai Pengelola Sistem dan Jaringan, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 76/SEK/Kp.I/SK/I/2021 tanggal 29 Januari 2021, diangkat sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Pelaporan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang dan dilantik pada tanggal 01 Maret 2021.

❖ **Pensiun**

Dalam tahun 2021 tidak ada Pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memasuki usia pensiun.

❖ **Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIMTEK		
			PERIHAL	WAKTU	TEMPAT
1	2	3	4	5	6
1	1. Faisal 2. T .Hidayat, S.Kom.	1. Operator SAIBA 2.Operator SIMAK BMN	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan	18 s/d 22 Januari 2021	Hotel Gran Arabia, Banda Aceh
2	1. Drs. Zul Amin 2. Romi Fandaya, A.Md.	1. Panitera 2. Petugas PTSP	Bimtek kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah se Aceh Tahun 2021	16 s/d 19 Februari 2021	Aula Utama Mahkamah Syar'iyah Aceh
3	1. Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. 2. Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 3. Hanif Rabbani. As, S.H. 4. Drs. Zul Amin, 5. Akbar Riansyah, S.E. 6. T .Hidayat, S.Kom.	1. Ketua 2. Hakim Pratama 3. Hakim Pratama 4. Panitera 5. Kasubbag Umum dan Keuangan 6. Supir	Studi Kaji Pembangunan Zona Integritas (ZI)	21 s/d 25 Februari 2021	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
4.	1. Maizar, S.H. 2. Desri Musdianto	1. Sekretaris 2. Bendahara Pengeluaran	Bimbingan Teknis Bidang Keuangan	23 s/d 27 Maret 2021	Banda Aceh
5.	1. Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 2. Aceng Rahmatulloh, S.Sy.	1. Hakim Pratama 2. Hakim Pratama	Bimbingan Teknis Hakim	8 s/d 12 Maret 2021	Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh

NO	NAMA/NIP	JABATAN	BIMTEK		
			PERIHAL	WAKTU	TEMPAT
1	2	3	4	5	6
6.	1. Mandarsah	1. Kasubbag Kepegawaian	Konsultasi Kepegawaian	21/23 Juni 2021	Banda Aceh
7.	1. Muzakir, S.H.I., MH. 2. Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 3. Aceng Rahmatulloh, S.Sy. 4. Mandarsah 5. Akbar Riansyah, S.E. 6. T .Hidayat, S.Kom.	1. Ketua 2. Hakim Pratama 3. Hakim Pratama 4. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 5. Kasubbag Umum dan Keuangan 6. Supir	Studi Kaji Aplikasi E-Court	23 s/d 27 Juli 2021	Mahkamah Syar'iyah Sinabang
8.	1. Muzakir, S.H.I., MH. 2. Aceng Rahmatulloh, S.Sy. 3. Mandarsah 5. Muszar, A.Md 6. T .Hidayat, S.Kom.	1. Ketua 2. Hakim Pratama 3. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala 4. Pengadministrasi Persuratan 6. Supir	Studi Banding Website	28 s/d 31 Juli 2021	Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
9.	1. Umi Kalsium, SH	1. Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan	Pelaksanaan Pelatihan E-Learning Penyusunan Laporan Kinerja	05 s/d 09 Juli 2021	Banda Aceh
11.	1. Akbar Riansyah, S.E. 2. Renaldi Eha, S.T. 3. Faisal	1. Kasubbag Umum dan Keuangan 2. Pranata Komputer Ahli Pertama 3. Operator SAIBA	Pelaksanaan End User Training (EUT) Aplikasi Sakti	19 s/d 25 Agustus 2021	Banda Aceh
12.	1. Drs. Zul Amin 2. Umi Kalsum, S.H.	1. Panitera 2. Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Permohonan	Bimtek Panitera Muda Jinayat	23 s/d 27 Agustus 2021	Banda Aceh
13.	1. Iqbal Kadafi, S.H., M.H. 2. Musad Al Haris Pulungan, S.H.I. 3. Romi Fandaya, A.Md 4. T .Hidayat, S.Kom.	1. Wakil Ketua 2. Hakim Pratama 3. Staf PTSP 4. Supir	Studi Banding Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	05 s/d 08 November 2021	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
14.	1. Maizar, S.H. 2. Mandarsah 3. Muszar, A.Md	1. Sekretaris 2. Kasubbag Kepegawaian 3. Pengadministrasi Persuratan	Bimtek Rapat Koordinasi Penyusunan SKP	22 s/d 24 Desember 2021	Banda Aceh

B. REGULASI TAHUN 2021

Bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Peradilan di bawahnya, maka perlu suatu Regulasi/kebijakan sehingga tercapainya Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Sinabang itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi guna tercapainya visi dan misi dan terciptanya *good governance*, Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah berupaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya:

- a. Undang –undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ;
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- c. Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;
- d. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ;
- e. Qanun Propinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1-144/KMA/SK/VIII/2011, tanggal 05 Januari 2011, tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
- h. Peraturan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung R.I dan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
- i. Peraturan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Peradilan yang Berada Di bawahnya;
- j. Peraturan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ;
- l. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung R.I ;

Dalam rangka Penataan Tata Laksana dan Penguatan Organisasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah melakukan berbagai upaya antara lain adalah :

- a. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- b. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi SOP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dokumen – dokumen yang disediakan antara lain:

- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Pengelola (Operator) SIPP Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Pengelola Perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Petugas Buku Induk Keuangan Perkara Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Kehumasan Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Pengelola Arsip Perkara Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Tim Pengelola Anggaran Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Syar'iyah Sinabang;
- SK Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang tentang Pembagian tugas Ketua dan wakil ketua dll;

Penguatan organisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam melakukan penugasan dan koordinasi dikarenakan tidak adanya duplikasi tugas dan fungsi dari unit kerja dan masing-masing jabatan. Dengan penguatan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi lebih tepat dan cepat sesuai rencana tahapan.

Guna mendukung terselenggaranya dengan baik pelaksanaan reformasi birokrasi pada area pelayanan publik perlu didukung dengan adanya dokumen-dokumen, antara lain :

1. SK Penunjukan Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor :W1-A19/035 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
2. SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP)/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran, untuk Pengelola DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor SP DIPA-005.04.2.401731/2020 pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/033 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
3. SK Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/036/KP.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
4. SK Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Nomor : W1-A19/ 039 /OT.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
5. SK Pemberntukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor : W1-A19/ 044/HM.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
6. SK Penunjukan Petugas Meja Pengaduan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 046/HM.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
7. SK Petugas Meja I, II,III Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
8. SK Penunjukan Mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 054/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
9. Sk Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Alokasi Penggunaannya pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
10. SK Penetapan Tim Pengelola Redaksi Website Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
11. SK Penunjukan Petugas Pengelola Arsip Perkara Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
12. SK Pembentukan Tim Teknologi Informasi di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
13. SK Penunjukan Kuasa Pengguna Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 01./KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

14. SK Pengelola Perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
15. SK Penunjukan Penggung Jawab, Pengawas dan Petugas Absensi Nomor : W1-A19/ 047/OT.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
16. SK Tim Pengelola dan Pelaksana Penerapan Aplikasi SIPP pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
17. SK Penunjukan Petugas Pencatat Notulen Rapat Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
18. SK Penunjukan Petugas Buku Induk Keuangan Perkara Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
19. SK Penunjukan Koordinator Penanganan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
20. SK Urutan Senioritas Hakim dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 01 /OT.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
21. SK Penunjukan Koordinator Pengawas dan hakim Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 04 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
22. SK Penunjukan Tim Pemeriksa Berkas Perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/05/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
23. SK Susunan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 06/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
24. SK Pelaksana Kegiatan Kehumasan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 07/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
25. SK Pembagian Tugas Antara Ketua dan Wakil Ketua pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/02 /KP.02.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
26. SK Pengangkatan Kasir pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 07 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
27. SK Penertiban Pengelolaan Dana IKAHI, PTWP, IPASPI, INFAQ JSP, Dana Kesejahteraan Pegawai, Varia Peradilan dan Mimbar Hukum pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/045/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
28. SK Penarikan Panjar Biaya Panggilan Perkara Isbat Nikah Radius Sulit (5,6,7 dan 8) pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor: W1-A19/ 08 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

29. SK Rincian Tugas Pegawai (*Jobdescription*) Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 010/KP.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
30. SK Rincian Tugas Honorer (*Jobdescription*) Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/ 09 /KP.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
31. SK Penetapan Biaya Proses Nomor : W1-A19/ 011/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
32. SK Panjar Biaya Perkara Nomor : W1-A19/ 012 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
33. SK Tim Reformasi Birokrasi Nomor : W1-A19/ 013/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
34. SK Penunjukan Bendahara Biaya Perkara Nomor : W1-A19/ 014/KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
35. SK Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pengelola Biaya Proses Tahun 2020 Nomor W1-A19/14 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
36. SK Penunjukan Bendahara Biaya Perkara Nomor : W1-A19/ 015 /KU.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
37. SK Penunjukan Tim Akreditasi Penjamin Mutu (APM) pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor : W1-A19/051/OT.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
38. SK Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Tahunan Tahun 2018 Nomor : W1-A19/ 017/KP.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
39. SK Penunjukan Tim Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun 2018 Nomor : W1-A19/ 018 /OT.01/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
40. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Faisal Nomor : W1-A19/011/KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
41. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Sunarli Nomor : W1-A19/ 013 /KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
42. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Fifi Sarwina Nomor : W1-A19/ 012/KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
43. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. T. Hidayat, S. Kom., Nomor : W1-A19/ 018/KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
44. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Hardiman Nomor : W1-A14/ 019 /KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.

45. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Yusrawadin
Nomor : W1-A15/ 015/KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
46. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Nurmani
Nomor : W1-A19/ 016/KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari 2021.
47. SK Pengangkatan Tenaga Honorer Mahkamah Syar'iyah Sinabang An. Romi
Fandaya, A. Md. Kom, Nomor : W1-A19/ 017 /KP.00/I/2021 tanggal 04 Januari
2021.

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2021, Mahkamah Syar'iyah Sinabang mendapatkan alokasi anggaran dari Mahkamah Agung sebesar Rp. 9.681.009.000,- (*Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ribu rupiah*). Dengan rincian di antaranya akun 51 sebesar Rp. 3.103.509.000,- (*Tiga Milyar Seratus Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) sedangkan pada akun 52 sebesar Rp. 1.134.382.000,- (*Satu Milyar seratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah*) dan Akun 53 Sebesar Rp. 6.535.000.000,- (*Enam milyar Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*)

Anggaran yang didistribusikan melalui DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401730/2021 tanggal 17 Nopember 2020, sebesar Rp. 9.681.009.000,- (*Sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta Sembilan ribu rupiah*). merupakan pengelolaan anggaran yang berasal dari unit eselon I Badan Urusan Administrasi, sedangkan sisanya sebesar Rp. 66.950.000,- (*Enam puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) merupakan pengelolaan anggaran yang berasal dari unit eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama didistribusikan melalui DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.401731/2021 tanggal 17 Nopember 2020.

Sesuai dengan Pagu DIPA 2021 sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah 3 (Tiga) Kali melakukan Revisi DIPA Anggaran tahun 2021 dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Revisi dimaksud untuk memenuhi belanja operasional.

Revisi DIPA yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Sinabang adalah :

1. Revisi Ke- I (satu) tanggal 28 September 2021 Anggaran DIPA 005.01.2.401730/2021.
2. Revisi Ke- II (dua) tanggal 17 November 2021 Anggaran DIPA 005.01.2.401730/2021.

3. Revisi Ke- III (tiga) tanggal 30 November 2021 Anggaran DIPA 005.01.2.401730/2021.

Pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang tidak pernah melakukan ralat SPM (Surat Perintah Membayar) .

Dari pagu yang telah dialokasikan, selama tahun anggaran 2021 hingga tanggal 31 Desember 2021, Mahkamah Syar'iyah Sinabang mampu merealisasikan anggaran :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401730/2021,

Realisasi sebesar Rp. **9,118,421,529,-** (*Sembilan milyar Seratus Delapan Belas Juta Empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*) dengan persentase mencapai 98,96 %. Sisa Pagu sebesar Rp. **95,384,471,-** (*Sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah*) dengan persentase 1,04 %.

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.401731/2021,

Realisasi sebesar Rp. 66.310.000,- (*Enam puluh Enam Juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*) dengan persentase sebesar 99,04 %. Sisa Pagu sebesar Rp. 640.000,- (*Enam ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan persentase 0,6 %.

Rincian Pagu, Realisasi Belanja, Pengembalian dan Sisa Pagu DIPA Mahkamah Syar'iyah Sinabang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.401730/2021

a. Belanja Pegawai (51)

- Pagu Rp. 1.825.274.000,- (100,00 %)
- Realisasi Belanja Rp. 1.797.769.654,- (98,49 %)
- Sisa Anggaran Rp. 27.504.346,- (1,51 %)

b. Belanja Barang (52)

- Pagu Rp. 1.153.032.000,- (100,00 %)
- Realisasi Belanja Rp. 1.098.226.795,- (95,25 %)
- Sisa Anggaran Rp. 54.805.205,- (4,75 %)

c. Belanja Modal (53)

- Pagu Rp. 6.235.500.000,- (100,00%)
- Realisasi Belanja Rp. 6.222.425.080,- (99,76%)
- Sisa Anggaran Rp. 13.074.920,- (0,24%)

2. DIPA Nomor : DIPA-005.04.2.401731/2021

a. Belanja Barang (52)

- Pagu Rp. 66.950.000,- (100,00%)
- Realisasi Belanja Rp. 66.310.000,- (99,04%)
- Sisa Anggaran Rp. 640.000,- (0,9%)

Untuk daftar lebih terperinci berdasarkan akun masing-masing jenis belanja, sebagaimana tabel berikut ini :

Rincian Anggaran, Realisasi Belanja dan Sisa Anggaran Per-31 Desember 2021 menurut Jenis dan Akun Belanja

Nomor Dokumen : DIPA-005.01.2.401730/2021

No	Kode Akun Belanja	Pagu Awal (Rp.)	Pagu Setelah Revisi (Rp.)	Realisasi Belanja (Rp.)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp.)	Persentase Sisa (%)
1	2	3		4	5	6	7
I.	Belanja Pegawai	1.969.127.000	1.825.274.000	1.797.769.654	98,49 %	27.504.346	1,53 %
1	511111	744.470.000	696.578.000	694.578.380	99,71%	1.999.620	0,29 %
2	511119	12.000	11.000	10.867	98,79%	133	1,22 %
3	511121	64.434.000	55.206.000	55.007.020	99,64%	198.980	0,36 %
4	511122	22.734.000	17.448.000	17.229.762	98,75 %	218.238	1,27 %
5	511123	28.140.000	28.570.000	26.180.000	91,63 %	2.390.000	9,13 %
6	511124	692.300.000	677.100.000	674.600.000	99,63 %	2.500.000	0,37 %
7	511125	124.180.000	74.260.000	72.961.178	98,25 %	1.298.822	1,78 %
8	511126	52.094.000	48.000.000	46.384.800	96,64 %	1.615.200	3,48 %
9	511129	137.188.000	142.875.000	127.829.000	89,47 %	15.046.000	11,77 %
10	511151	22.575.000	14.226.000	13.195.000	92,75 %	1.031.000	7,81 %
11	511157	81.000.000	71.000.000	70.200.000	98,87 %	800.000	1,14 %
II.	Belanja Barang	1.134.382.000	1.148.032.000	1.093.226.795	95,23 %	54.805.205	5,01 %
1	521111	278.150.000	278.150.000	269.826.000	97,01 %	8.324.000	3,08 %
2	521119	8.232.000	8.232.000	4.316.000	52,43 %	3.916.000	90,73 %
3	521811	35.072.000	35.072.000	35.072.000	100 %	-	-
4	521111	219.000.000	219.000.000	213.448.307	97,46 %	5.551.693	2,60 %
5	521114	9.600.000	3.600.000	919.500	25,54 %	2.680.500	291,52 %
6	522111	30.000.000	30.000.000	21.935.753	73,12 %	8.064.247	36,76 %
7	522112	9.000.000	9.000.000	2.517.000	27,97 %	6.483.000	257,57 %
8	522113	2.400.000	12.000.000	6.645.635	55,38 %	5.354.365	80,57 %
9	523111	92.100.000	92.100.000	92.100.000	100 %	-	-
10	523119	43.600.000	43.600.000	43.600.000	100 %	-	-
11	523121	129.500.000	129.500.000	129.499.600	100 %	400	0,00 %
12	521115	47.400.000	54.600.000	54.600.000	100 %	-	-

13	521119	12.000.000	25.650.000	25.650.000	100 %	-	-
14	521119	3.600.000	3.600.000	3.600.000	100 %	-	-
15	522151	600.000	600.000	600.000	100 %	-	-
16	524111	82.560.000	82.560.000	82.559.000	100 %	1.000	0,00 %
17	524119	18.328.000	28.000	-	-	28.000	-
18	524111	70.040.000	77.540.000	77.538.000	100 %	2.000	0,00 %
19	522141	43.200.000	43.200.000	28.800.000	66,67 %	14.400.000	50 %
20	521241	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100 %	-	-
III.	Belanja Modal	6.572.500.000	6.235.500.000	6.222.425.080	99,79 %	13.074.920	0,21 %
1	532111	37.500.000	37.500.000	37.488.000	99,97 %	12.000	0,03 %
2	533121	6.535.000.000	6.198.000.000	6.184.937.080	99,79 %	13.062.920	0,21 %

Realisasi Nomor Dokumen : DIPA-005.04.2.401731/2021

No	Kode Akun Belanja	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi (Rp.)	Realisasi Belanja	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase Sisa
		(Rp.)		(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3		4	5	6	7
I.	Belanja Barang	66.950.000	66.950.000	66.310.000	99,04 %	640.000	0,97 %
1	521211	400.000	400.000	400.000	100 %	0	-
2	521811	500.000	500.000	500.000	100 %	0	-
3	524113	750.000	750.000	750.000	100 %	0	-
4	521211	600.000	600.000	600.000	100 %	0	-
5	521211	700.000	700.000	700.000	100 %	0	-
6	521114	200.000	200.000	200.000	100 %	0	-
7	521219	13300000	13.300.000	13.150.000	98,87 %	150.000	1,14 %
8	521219	25.500.000	3.000.000	3.000.000	100 %	0	-
9	524113		22.500.000	22.000.000	97,78 %	500.000	2,27 %
10	522131	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100 %	0	-

B. PENGELOLAN SARANA DAN PRASARANA

a. Gedung Kantor

Kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang terletak di Jalan Tgk. Diujung KM. 05 Desa Suak Buluh – Sinabang, berdiri di atas tanah seluas 3.800 m² dengan status milik Pemerintah Republik Indonesia Cq.Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta dengan Nomor NIB 01.13.04.29.00533. Luas bangunan gedung kantor ialah 1.186 m² yang terdiri dari 2 (dua) unit, yakni:

1. Gedung lama dengan luas 850 m² dibangun pada tahun 2007 perolehan dari bantuan BRR NAD-Nias

2. Gedung baru dengan luas 336 m² dibangun pada tahun 2013 dan pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang mendapatkan alokasi Dana sebesar 6.535.000.000 untuk Renovasi gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang di perolehan dari dana APBN/DIPA.

Gedung penunjang lainnya yang dibangun pada areal gedung kantor adalah gedung pos jaga seluas 8 m² serta lahan parkir. Namun hingga saat ini Kantor Mahkamah Syar'iyah Sinabang belum memiliki gedung khusus yang dijadikan sebagai Musholah, sementara ini masih memfungsikan ruang gudang sebagai tempat sholat berjamaah.

3. Bangunan Rumah Dinas/Rumah Negara

Lokasi Rumah Dinas Mahkamah Syar'iyah Sinabang berjarak ± 5 KM dari Kantor Utama yang berdiri di atas tanah seluas 1.200 m² berjumlah 2 (dua) unit dengan luas masing masing bangunan 70 m² Golongan I Type C. Saat ini kedua unit Rumah Dinas tersebut ditempati oleh Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

4. Gedung/Bangunan Lainnya

Selain dari 2 (dua) kategori gedung/bangunan di atas, Mahkamah Syar'iyah Sinabang juga memiliki Gedung yang dulunya digunakan sebagai kantor, akan tetapi saat ini gedung tersebut diperuntukkan sebagai tempat tinggal Hakim dan Pegawai, pada tahun 2021 difungsikan menjadi mess.

Matriks sarana / Prasarana

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Panitera	1	
4	Ruang Sidang Umum	2	1 Jadi R. Kasub Kepegawaian
5	Ruang Kepaniteraan	5	
6	Ruang Panmud Hukum	1	
7	Ruang Panmud Permohonan	1	
8	Ruang Panmud Gugatan	1	
9	Ruang Panmud Jinayah	1	
10	Ruang Sububbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
11	Ruang Kasububbag Kepagawaian	1	
12	Ruang Kasububbag Umum dan Keuangan	1	

13	Ruang Perpustakaan	1	
14	Ruang Mediasi	1	
15	Ruang Panitera Pengganti	1	
16	Ruang Bendahara	1	
17	Ruang Tunggu	1	
No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Komputer	16	10 Rusak ringan
2	Laptop	20	7 Rusak Berat
3	Printer	13	Baik
4	Mesin Ketik	4	4 Rusak Berat
5	AC	11	2 Rusak Berat
6	Getset	1	1 Rusak Berat
7	Server	2	Baik

b. Sarana Transportasi / Kendaraan dinas

Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 dan 7 (unit) kendaraan dinas roda 2, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1.	Minibus	2006	√			Toyota Inova
2.	Minibus	2016	√			Toyota Avanza
II.	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Honda GL Max	1997			√	
2	Mega Pro BL 2423 SM	2006			√	
3	Mega Pro BL 2424 SM	2006	√			
4	Honda Supra X 125 BL 2564 SM	2006	√			
5	Honda Supra BL 2021 SN	2009	√			
6	Honda Supra BL 2092 SN	2009	√			
7	Honda Supra BL 2001 SN	2009	√			

c. Rumah Dinas

<i>No</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Kondisi</i>			<i>Keterangan</i>
			<i>Baik</i>	<i>Rusak Ringan</i>	<i>Rusak Berat</i>	
1	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	Baik			

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Salah satu bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dukungan teknologi informasi khususnya terkait SIPP. Teknologi informasi yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara garis besar sudah dalam kategori standar, namun ada beberapa yang belum tersedia sebagai fasilitas pendukung seperti mesin antrian sidang, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun sebagian dari kekurangan dukungan teknologi informasi tersebut sudah dalam penyusunan anggaran tahun 2022. Sedangkan aplikasi yang berbasis website yaitu mengenai berita, proses pelaporan baik pelaporan perkara maupun kesekretariatan kepada tingkat banding dan eselon I, serta Sistem Informasi Perkara Pengadilan yang dapat diperoleh dari website Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan alamat www.ms-sinabang.net. Dan pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang mengembangkan aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh atau download di Playstore dengan nama Aplikasi Pelayanan Masyarakat (ALAM) dan aplikasi tersebut akan dikembangkan secara bertahap.

1. Implementasi e-court

Dasar hukum layanan e-court adalah peraturan Mahkamah Agung nomor : 01 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan berdasarkan surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 perihal implementasi penggunaan e-court. Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam tahun 2021 telah berhasil mendapatkan nomor perkara melalui e-court sebanyak 55

perkara, pelaksanaan e-court pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejauh ini berjalan dengan lancar sehingga memudahkan secara waktu dan biaya.

2. Implementasi SIPP

Dasar hukum layanan SIPP adalah peraturan Mahkamah Agung nomor : 01 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dan berdasarkan surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama tanggal 17 Juni 2019 perihal implementasi penggunaan SIPP. Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam tahun 2021 mendapatkan nomor perkara melalui SIPP sebanyak 183 perkara, pelaksanaan SIPP pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejauh ini berjalan dengan lancar sehingga memudahkan secara waktu dan biaya bagi pencari keadilan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang begitu cepat, tuntutan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik masyarakat dan transparansi peradilan semakin tinggi. Dalam hal ini, hampir pada setiap lini organisasi satuan kerja masing-masing mengelola aplikasi pendukung serta website sebagai media dalam memberikan pelayanan masyarakat. Demi memenuhi tuntutan tersebut, Tim TI Mahkamah Syar'iyah Sinabang terus berupaya melakukan pembenahan dan pengembangan dalam pengelolaan website yang menggunakan domain www.ms-sinabang.net tersebut. Perangkat lunak yang ada hingga akhir 2021 yakni:

No.	Software	Fungsi	Bidang	Keterangan
1.	Website	Informasi dan pelaporan umum	Satker	ms-sinabang.net
2.	Siadpa Plus	Informasi dan pelaporan perkara	Kepaniteraan	Aktif
3.	Aplikasi SIPP	Informasi dan pelaporan perkara	Kepaniteraan	Aktif
4.	Aplikasi SAKTI	Perencanaan Anggaran	Perencanaan	Aktif
5.	Aplikasi GPP	Pendapatan Pegawai	Kuangan	Aktif
6.	Aplikasi SPM	Pencairan Anggaran	Kuangan	Aktif
7.	Aplikasi SAIBA	Realisasi Anggaran	Kuangan	Aktif
8.	SIMAK BMN	Penatausahaan BMN	Umum	Aktif

9.	Aplikasi SIMAN	Pngelolaan dan perencanaan BMN	Umum	Aktif
10.	Apl. Persediaan	Laporan belanja habis pakai	Umum	Aktif
11.	SIMPEG Online	Cakupan data Pegawai	Kepegawaian	Aktif
				dll.

3. Perangkat Keras (Hardware)

Pada tahun 2021 sarana Perangkat Keras terkait dukungan teknologi informasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Sinabang sudah cukup tersedia dan memadai, Perangkat keras yang ada hingga akhir tahun 2021 meliputi:

No.	Hardware	Jumlah	Baik	Rusak	Keterangan
1.	Internet (set)	1	1	0	Max. Speed 1000 mb/s
2.	Server	2	2	0	
3.	Komputer	18	9	9	
4.	Printer	13	8	5	
5.	Scanner	3	1	2	
6.	Laptop	20	13	7	
7.	Fingerprint	1	1	1	
8.	Wireless Router	1	1	0	
9.	Wireless Sound	1	1	0	
10	CCTV	6	6	0	3 online Internet

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Salah satu unsur penting untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi adalah dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi dan misi organisasi. Instansi sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi yang belum terpenuhi saat ini ke dalam struktur organisasinya.

❖ Akreditasi Penjaminan Mutu

Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh aparatur di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Sinabang. Adapun untuk tahun 2020 dan tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara khusus telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu tersebut. Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah semaksimal dan pada tahun 2020 mendapatkan A serta tahun 2021 mendapatkan A (excellence) pengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam Akreditasi tersebut pada pelaksanaan tugas terutama dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

❖ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,
2. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan membuat laporan bulanan selanjutnya meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke *backoffice* untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Mahkamah Syar'iyah secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan,
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

❖ *Inovasi Pelayanan Publik*

Salah satu bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan adalah dukungan teknologi informasi khususnya terkait memudahkan serta mengikuti perkembangan zaman dunia TI berbasis android. Pengembangan Inovasi Teknologi informasi Aplikasi Android bernama Aplikasi Pelayanan Masyarakat atau (ALAM) yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara garis besar sudah dalam bisa didownload di Playstore dengan kegunaan untuk mengetahui proses Akta Cerai, melihat perkara serta dengan menu-menu untuk kepegawaian seperti SIKEP, dan aplikasi ALAM berbasis android dikategorikan Aplikasi berkelanjutan atau upgrade, namun ada beberapa yang belum tersedia sebagai fasilitas pendukung seperti mesin genset, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran. Namun sebagian dari kekurangan dukungan teknologi informasi tersebut sudah dalam penyusunan anggaran tahun 2022. Sedangkan aplikasi yang berbasis website yaitu mengenai berita, proses pelaporan baik pelaporan perkara maupun kesekretariatan kepada tingkat banding dan eselon I, serta Sistem Informasi Perkara Pengadilan yang dapat diperoleh dari website Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan alamat www.ms-sinabang.net.

BAB VI

PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, tidak hanya menyangkut penyelenggaraan peradilan melainkan juga meliputi pelaksanaan penanganan administrasi, baik administrasi perkara yang dikelola oleh bagian kepaniteraan (Gugatan, Permohonan dan Jinayat) maupun administrasi umum yang dikelola oleh bagian kesekretariatan (Kepegawaian, Keuangan, Umum dan lain-lain) serta perilaku dan perbuatan para pejabat dan para pegawai Mahkamah Syar'iyah Sinabang baik perilaku dalam dinas maupun di luar dinas. Untuk pengawasan internal tersebut telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang di bawah koordinasi Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang.

*Susunan Tim Pengawas, Hakim Pengawas Bidang
Dan Pengamat Pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang*

No	N a m a	Jabatan Dalam Kedinasan	Bidang Pengawasan
1	Iqbal Kadafi NIP.19	Hakim Pratama Madya (Koordinator)	Koordinator Pengawasan, Administrasi Kesekretariatan, Adm umum, Keuangan, TI dan kepegawaian
2	Musad Al Haris Pulungan, S.H.I NIP.19860821 201712 1 003	Hakim Pratama (Anggota)	Administrasi berkas Perkara, Adm SIPP dan ADM Perkara E-Litigasi
3	Hanif Rabbani, AS. SH NIP.19	Hakim Pratama (Anggota)	Memeriksa Kinerja Pelayanan Publik SARPRAS, pengaduan dan pelaporan

Hakim Pengawas yang ditunjuk tersebut sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan jalannya pengawasan sudah dilaporkan kepada Penanggung jawab dan Koordinator secara rutin dan berkala.

Pengawasan yang dilakukan meliputi Pengawasan terhadap jalannya peradilan dan Pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan. Pengawasan terhadap jalannya peradilan meliputi pengawasan teknis peradilan dan pengawasan administrasi peradilan.

Pengawasan teknis peradilan yang diperhatikan tentang kemampuan teknis Hakim dalam menangani perkara, teknis persidangan, dan tenggang waktu dalam penyelesaian perkara. Sedangkan pengawasan administrasi peradilan dilakukan kepada pejabat kepaniteraan meliputi :

- a. Tertib prosedur penerimaan perkara;
- b. Tertib register perkara;
- c. Tertib pengelolaan buku keuangan perkara;
- d. Tertib penataan arsip perkara;
- e. Tertib penyiapan laporan.

Pengawasan terhadap tingkah laku aparat peradilan meliputi tingkah laku dan perbuatan baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Pengawasan dan penilaian terhadap aparat peradilan dalam kedinasan dilakukan oleh atasan langsung atau yang disebut juga dengan pengawasan melekat yaitu pengawasan atasan kepada bawahan yang menjadi tanggung jawabnya, misalnya: Pengawasan terhadap Hakim, Panitera dan Sekretaris dilakukan oleh Ketua, Pengawasan terhadap Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dilakukan oleh Panitera sebagai atasan langsung, serta pengawasan terhadap Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dilakukan oleh Sekretaris dan sebagainya. Hasil Pengawasan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Sedangkan menyangkut dengan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai dilakukan dengan melalui instrumen absensi. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Disiplin Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung, maka pengawasan internal dilakukan dengan cukup ketat melalui absensi biometrik dan absensi manual. Penanggung jawab absensi ini bekerja dengan mengumpulkan data selama 1 bulan, selanjutnya petugas menyerahkan absen harian kepada Kepala Urusan Kepegawaian dan Ortala untuk dilakukan rekapitulasi.

Adapun penilaian terhadap tingkah laku dan perbuatan Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pegawai di luar kedinasan meliputi :

- a. Tertib Keluarga.
- b. Hubungan Masyarakat.

Hasil pengawasan yang didapat selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan memberikan *reward*, sebaliknya bagi yang *indisipliner* akan dilakukan pembinaan atau dikenakan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu juga pengawasan dilakukan oleh para Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Hakim Tinggi Pengawasan dan Pembinaan (Hatiwasbin) wilayah Kabupaten/Kota. Pengawasan juga dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Hasilnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, bidang administrasi kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan menurut petunjuk yang ada.

Mengenai mekanisme pengawasan baik terhadap jalannya peradilan maupun terhadap perilaku aparat pengadilan yang telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/08/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan lingkungan peradilan yakni dalam bentuk pemeriksaan dengan mekanisme pengamatan dari dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah ada atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut peraturan yang berlaku.

B. EVALUASI

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Terhadap hasil-hasil temuan dalam pengawasan baik yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, Hakim Tinggi Pengawasan dan Pembinaan dari Mahkamah Syar'iyah Aceh maupun Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung, telah dilakukan evaluasi dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Sebagai hasil evaluasi dan tindak lanjut tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut :

❖ *Administrasi Perkara*

Pada umumnya administrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang sudah baik dan tertib, dan tetap dipertahankan secara terus menerus.

❖ *Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan*

Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik yang meliputi Relaas Panggilan, Berita Acara Sidang dan Pelaksanaan Persidangan.

❖ *Administrasi Umum*

Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan masih perlu pembenahan dan peningkatan serta perhatian dari Sekretaris selaku penanggung jawab tata kelola administrasi kesekretariatan, diharapkan pembenahan dan pengelolaan ini harus mendapatkan pengawasan dan pembinaan dari Hakim Pengawas Bidang Umum secara berkesinambungan.

❖ *Kinerja Pelayanan Publik*

Pelayanan Publik pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang di tahun 2021 sudah cukup baik dalam pelaksanaannya dengan adanya penambahan beberapa sarana pendukung yang memadai dan hendaknya bukan hanya tetap dipertahankan tetapi diharapkan ke depannya terus ditingkatkan.

❖ *Manajemen Peradilan*

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan manajemen peradilan, pembinaan yang terus menerus harus menjadi prioritas. Pengawasan melekat telah dilaksanakan dan juga pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang, diharapkan, kondisi ini dapat terus berlangsung dan berlanjut.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum program kerja Mahkamah Syar'iyah Sinabang dalam tahun 2021 telah dilaksanakan dan hari ke hari cukup membaik meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan.
2. Perkara yang diterima dari Januari sampai Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam rekapitulasi laporan perkara bulan Desember 2021.
3. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah berjalan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola Bindalmin.
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/III/1994 dengan mengangkat Hakim Pengawas Bidang.
5. Penata usahaan bidang kepegawaian, keuangan dan umum serta tata laksana, Teknologi Informasi dan pelaporan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
6. Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab pelaksanaan tugas pejabat dan pegawai pada Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat, staf dan termasuk para PPNN.
7. Halaman dan lingkungan gedung kantor yang belum tertata dengan baik, menyebabkan upaya untuk mewujudkan Peradilan yang Agung dan upaya meningkatkan citra dan wibawa Mahkamah Syar'iyah Sinabang menjadi kurang maksimal.
8. Sering rusaknya perangkat keras Teknologi Informasi dan belum tersedianya Mesin Genset, menyebabkan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik

menjadi kurang prima. Kurangnya sinyal dan sering putusnya koneksi jaringan internet serta seringnya listrik PLN mati merupakan kendala utama bagi dalam mengakses dan mengupdate data dan informasi peradilan.

B. SARAN dan REKOMENDASI

1. Untuk lebih memantapkan dan membangkitkan semangat kerja bagi pejabat struktural maupun fungsional hendaknya ditunjang oleh sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai.
2. Untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kemampuan bagi pegawai sangat perlu diadakan pembinaan dalam bentuk pelatihan pelatihan baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung sendiri ataupun oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh terutama pada bidang manajemen administrasi umum dan bidang perkara dengan berbagai aplikasinya, serta pelatihan tentang penerapan sistem Teknologi Informasi (TI) dan pembinaan ke dalam secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan baik di bidang perkara maupun bidang kesekretariatan.
3. Anggaran biaya operasional Mahkamah Syar'iyah Sinabang kiranya dapat ditingkatkan untuk mengatasi segala kebutuhan dalam menunjang kinerja terutama untuk pembelian, pengadaan, perbaikan sarana dan prasarana yang kurang dan dinilai masih belum memadai.
4. Perlu adanya anggaran yang memadai penambahan kendaraan operasional aparatur, renovasi rumah dinas pimpinan dan pembangunan rumah dinas bagi para Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang representatif sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 demi mencapai visi Mahkamah Agung yaitu "Membangun Peradilan Indonesia yang Agung".